

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM
AKIBAT KELALAIAN PENGURUS Di PT “X”

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ROCHBINI ROSSI
NPM. 0871010038

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM
AKIBAT KELALAIAN PENGURUS Di PT “X”

Disusun oleh :

ROCHBINI ROSSI
0871010038

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 16 Juni 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn
NPT. 37507070225

H. Sutrisno, SH. M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001

3.

Subani SH. M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

4.

Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn
NPT. 37507070225

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM
AKIBAT KELALAIAN PENGURUS Di PT “X”

Disusun oleh :

ROCHBINI ROSSI
0871010038

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 16 Juni 2012

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. H. Sutrisno, SH. M.Hum. : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM. : (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
3. Subani, SH. MSi. : (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001
4. Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn : (.....)
NPT. 37507070225

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rochbini Rossi
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 16 April 1986
NPM : 0871010038
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jln. Rungkut Harapan Blok L-12 A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Akibat Kelalaian Pengurus di PT
“X” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
PEMBIMBING UTAMA

Surabaya, 13 Juni 2012
PENULIS

Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn
NPT.37507070225

Rochbini Rossi
NPM.0871010038

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Akibat Kelalaian Pengurus di PT “X” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulisan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Berbagai masukan, dorongan, bimbingan, sumbangan pemikiran dan pengorbanan dari berbagai pihak sangat penulis hargai. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dengan segala fasilitas yang ada di Fakultas Hukum.
2. Bapak H. Sutrisno, SH. M.Hum., selaku Wakil Dekan I yang telah memberikan sumbangsih pemikiran serta saran-saran kepada penulis demi suksesnya skripsi ini.

3. Bapak Subani, SH. Msi., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn., dalam kedudukannya sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah kesibukan yang begitu padat, untuk memberikan pengarahan, bimbingan, koreksi dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur beserta staff untuk segala pelayanan administrasinya dan Koordinator Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan atas peminjaman buku-buku.
7. Semua dosen dan staff dosen Universitas Pembangunan Nasioanal ”Veteran” Jawa Timur
8. Keluarga tercinta terutama orang tua, yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril, serta do’a kepada penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan 2008, dan sahabat-sahabatku, serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.....terimakasih.

Akhirnya kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, peneliti sampaikan terima kasih atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa di dalam Skripsi ini terdapat kekurangan dan keterbatasan yang bersumber pada kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran masih penulis butuhkan demi penyempurnaan tulisan ini.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Rochbini Rossi
NPM : 0871010038
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 16 April 1986
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM
AKIBAT KELALAIAN PENGURUS DI PT “X”

ABSTRAKSI

Penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami mengenai praktek pelaksanaan pembelian saham PT “X” di Bursa Efek, dan untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham akibat kelalaian pengurus yang mengakibatkan PT “X” pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa data menggunakan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil Pembahasan terhadap permasalahan dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli saham selalu ditopang adanya prospektus yang menggambarkan kondisi perusahaan. Prospektus ini menjadi bagian dan keterbukaan dan PT atau pemegang saham yang akan melepas sahamnya. Untuk itu sangat tepat apabila pihak pembeli melakukan investigasi. Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham di PT X yang pailit akibat kelalaian pengurus sebagai terangkum dalam UUPM pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Nomor IX.E.1 yang menyatakan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan tertentu merupakan tindakan represif. Artinya, perbuatan telah terjadi kemungkinan kerugianpun telah dialami. Selain itu menurut UUPT Pasal 85 Ayat (3), dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan direksi atau komisaris atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan perdata atas nama perseroan kepada pengadilan negeri terhadap direksi atau komisaris.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pemegang saham, pertanggung jawaban pengurus PT, pailit.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kajian Pustaka	4
1.5.1. Perlindungan Hukum	4
1.5.2. Tinjauan Umum Investasi	6
1.5.2.1. Pengertian Investasi	6
1.5.3. Tinjauan Umum Pasar Modal	7
1.5.3.1. Pengertian Pasar Modal	7

1.5.3.2. Pelaku Utama Pasar Modal	10
1.5.3.3. Instrumen Pasar Modal	11
1.5.3.4. Penawaran Umum	16
1.5.3.5. Transaksi Efek	21
1.5.4. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	23
1.5.4.1. Pengertian Perseroan Terbatas	23
1.5.4.2. Modal Perseroan Terbatas	24
1.5.4.3. Saham Perseroan	25
1.5.5. Tinjauan Umum Kepailitan	26
1.5.5.1. Pengertian Kepailitan	26
1.5.5.2. Tujuan Kepailitan	27
1.5.5.3. Syarat-Syarat PT dinyatakan Pailit	27
1.5.5.4. Kurator dalam Kepemilikan	28
1.5.5.5. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham setelah PT dinyatakan Pailit	30
1.5.5.6. Hak dan Kewajiban PT setelah dinyatakan Pailit	31
1.6. Metode Penelitian	32
1.6.1. Jenis Tipe Penelitian	32
1.6.2. Sumber Data	33
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	34
1.6.4. Metode Analisis Data	35
1.7. Sistematika Penulisan	35

BAB II PELAKSANAAN PEMBELIAN SAHAM DI BURSA EFEK	37
2.1. Pelaksanaan Jual Beli Saham	37
2.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Saham di Bursa Efek	49
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM AKIBAT KELALAIAN PENGURUS YANG MENGAKIBATKAN PT “X” PAILIT	51
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham	65
3.2. Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Yang Lalai Sehingga Mengakibatkan PT Menjadi Pailit	70
BAB IV PENUTUP	82
4.1. Kesimpulan.....	82
4.2. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia pernah mengalami masalah krisis moneter ketika pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1998 lalu. Banyaknya perusahaan-perusahaan pada saat itu mengalami kepailitan yang diakibatkan ketidakmampuan dari perusahaan tersebut untuk melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Selain itu, para investor asing berhenti menanamkan modalnya ke Indonesia yang mengakibatkan sumber devisa negara terancam. Perusahaan-perusahaan kewalahan untuk memenuhi kewajibannya, baik kepada kreditur dalam negara maupun kepada kreditur luar negara, sehingga muncullah masalah wanprestasi dari pihak debitur. Akibatnya, banyak perusahaan nasional yang tutup karena tidak mampu bersaing dan semakin menumpuknya utang yang belum terbayarkan sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengalami kepailitan dan/ atau likuidasi yang semakin menambah angka pengangguran di Indonesia

Untuk mengatasi kondisi negara dan pemerintahan yang seperti ini, serta memberi suatu jaminan perlindungan yang pasti terhadap para investor asing juga lokal, maka perlu dibuat suatu peraturan yang dapat menjadi sarana hukum sebagai solusinya, baik bagi pihak debitur sendiri maupun bagi pihak krediturnya. Peraturan itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang jo. Faillissementsverordening

sebagaimana termuat dalam Staatsblad 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad 1906 Nomor 348.

Seiring dengan perkembangan Hukum Kepailitan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bergerak dinamis, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disahkan dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2004 yang lalu¹.

Di negara-negara maju, pasar modal merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal. Dewasa ini pasar modal memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini khususnya pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha, mengingat perkembangan pasar modal akhir-akhir ini demikian meningkat, sehingga pasar modal memerlukan perhatian yang cukup serius supaya keberadaan pasar modal serta praktek pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial maupun kehidupan hukum di Indonesia. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu aturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu adanya Prinsip Keterbukaan

¹ Andar Panjaitan, Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit, Universitas Sumatera Utara, hal 4

(disclosure) yaitu kewajiban bagi pihak-pihak yang hendak melaksanakan penawaran umum.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pasar modal pada dasarnya sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun karena beberapa kondisi yang dialami, perusahaan tersebut dinyatakan mengalami kepailitan. Pailitnya suatu perusahaan pada dasarnya merupakan fenomena dalam dunia bisnis. Pailitnya suatu perusahaan terjadi akibat adanya putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Investor atau Pemilik Saham akan sangat dirugikan apabila perusahaan tempat mereka melakukan penanaman modal mengalami pailit, pemilik saham terancam tidak akan mendapatkan bagian dari harta pailit apabila harta pailit tersebut tidak tersisa setelah dilakukannya proses pembayaran utang terhadap kreditor. Oleh sebab itulah diperlukannya perlindungan hukum bagi pemegang saham di pasar modal. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham di perseroan terbatas yang pailit.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan pembelian saham di Bursa Efek ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham akibat kelalaian pengurus yang mengakibatkan PT “X” pailit ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai praktek pelaksanaan pembelian saham di Bursa Efek.
2. Untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham akibat kelalaian pengurus yang mengakibatkan PT “X” pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Menjadi kajian praktis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham akibat kelalaian pengurus yang mengakibatkan PT “X” pailit.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran bentuk-bentuk atau praktek pelaksanaan pembelian saham di Bursa Efek.
- b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham akibat kelalaian pengurus yang mengakibatkan PT “X” pailit.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

Perlindungan hukum terhadap kreditor telah menjadi sorotan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 demi menciptakan kepastian

² Zona Prasko, <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>, Definisi Perlindungan Hukum, Minggu, 22 April 2012, 13:10

hukum bagi para investor yang telah menanamkan modalnya bagi kegiatan bisnis di Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat antara lain, kemudahan untuk kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit, persyaratan pailit yang sederhana yaitu adanya dua kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang yang relative singkat serta proses pendamaian ditentukan oleh para kreditor.³

Bentuk perlindungan hukum yang preventif maupun represif terdapat dalam Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

1.5.2. Tinjauan Umum Investasi

1.5.2.1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam

³ Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam UU Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, Jurnal Hukum, Vol.16 April 2009, hal. 1

dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable.⁴

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁵

1.5.3. Tinjauan Umum Pasar Modal

1.5.3.1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor maupun lembaga usaha.⁶

Dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 3

⁵ Ibid

⁶ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op. cit*, hal. 166

memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka.

Dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar uang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan batasan pasar modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁷

Dari beberapa pengertian tersebut, kiranya dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan diterbitkan dan diperdagangkannya efek dengan penawaran umum dan perdagangan jangka panjang, melalui pasar perdana, pasar sekunder.⁸

Sedangkan Ketentuan Umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 adalah:

- (1) Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- (2) Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

⁷ Ibid, hal. 167

⁸ Ibid, hal 167

- (3) Bursa efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.
- (4) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- (5) Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- (6) Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- (7) Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
- (8) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain.
- (9) Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- (10) Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
- (11) Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (12) Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- (13) Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
- (14) Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh

Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

- (15) Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (16) Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
- (17) Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
- (18) Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
- (19) Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- (20) Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- (21) Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
- (22) Wali amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.⁹

1.5.3.2. Pelaku Utama Pasar Modal

1. Emiten

Emiten, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 butir ke-6 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Perusahaan yang akan melakukan emisi, harus terlebih

⁹ Himpunan Peraturan Pasar Modal, Cetakan November, Fokusmedia, Bandung, 2009, hal 2-5

dahulu menyampaikan pertanyaan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat dan setelah pernyataan pendaftaran efektif, emiten dapat melakukan penawaran umum.¹⁰

2. Investor

Investor/pemodal adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek.¹¹

3. BAPEPAM

BAPEPAM berfungsi mengawasi kualitas keterbukaan emiten dengan memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran BAPEPAM sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap keunggulan atau kelemahan saham yang ditawarkan. Pasal 75 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mengatur mengenai wewenang dan fungsi BAPEPAM dan nilai terlihat pada pernyataan yang tertera dalam prospectus yang dikeluarkan oleh emiten yang berbunyi “BAPEPAM tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini”.¹²

1.5.3.3 Instrumen Pasar Modal

1. Obligasi

¹⁰ Ibid, hal 177

¹¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, op. cit, hal. 177

¹² Ibid, hal. 180-181

Obligasi atau instrument utang dapat dibedakan dalam beberapa jenis, bergantung pada sudut mana kita melihatnya apakah dari sudut pengalihan, jangka waktu, atau jaminan atas obligasi dan bunga yang dibayarkan. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis obligasi, yaitu:

a. Obligasi Berdasarkan Pengalihan

Dari cara pengalihan terdapat dua jenis obligasi, yaitu obligasi atas unjuk (bearer bond) dan obligasi atas nama (registered bond)

1) Obligasi atas unjuk

Ciri-ciri penting dari obligasi atas unjuk meliputi:

- a) Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi
- b) Setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap pembayaran bunga dilakukan
- c) Sangat mudah untuk dialihkan
- d) Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti bahan pembuat uang
- e) Bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi
- f) Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian

2) Obligasi atas nama

Sedangkan untuk obligasi atas nama untuk pokok dan bunga tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunga dan untuk pokok bunga nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Nama dan alamat pemilik dicatat di perusahaan emiten untuk memudahkan dalam pengiriman bunga. Kemudian obligasi atas nama untuk pokok dan bunga, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi, tetapi tidak ada kupon bunga, karena bunga langsung disampaikan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam daftar perusahaan emiten.

b. Obligasi Berdasarkan Jaminan

1) Obligasi dengan Jaminan

Adalah obligasi yang diberi agunan (collateral) untuk pelunasan pokok pinjaman beserta bunganya yang berupa harta kekayaan perusahaan, bisa berupa tanah, gedung dan lain-lain.

- 2) Obligasi tanpa Jaminan
Adalah obligasi yang tidak didukung oleh agunan.¹³
- c. Obligasi Berdasarkan Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga :
 - 1) Obligasi dengan Bunga Tetap
 - 2) Obligasi dengan Bunga Tidak Tetap
 - 3) Obligasi tanpa Bunga
 - 4) Obligasi yang Tidak Terbatas Jatuh Temponya
 - 5) Obligasi dengan Bunga Mengambang
- d. Obligasi Berdasarkan Nilai Pelunasan
Obligasi juga dapat dibedakan dari segi nilai pelunasan, terutama dikaitkan dengan merosotnya nilai uang. Disini nilai pelunasan obligasi dikaitkan dengan indeks tertentu.¹⁴
- e. Obligasi Berdasarkan Konvertibilitas
Jenis obligasi juga dapat dilihat dari hak untuk menukarkan obligasi dengan saham (common stock) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat pinjaman. Obligasi seperti ini disebut dengan "Convertible bonds".¹⁵
- f. Obligasi Berdasarkan Penerbit
Banyaknya dan tersebarnya emiten di beberapa daerah, maka obligasi juga berasal dari lembaga atau daerah tertentu, oleh karena itu dilihat dari pihak yang menerbitkannya, maka obligasi dapat dibedakan atas:
 - 1) Obligasi Pemerintah Pusat
 - 2) Obligasi Pemerintah Daerah
 - 3) Obligasi Perusahaan Swasta
 - 4) Obligasi Asing
 - 5) Obligasi Sampah
- g. Obligasi Berdasarkan Waktu Jatuh Tempo

¹³ Ibid, hal. 184

¹⁴ Ibid, hal. 185

¹⁵ Budi Untung, op. cit, hal. 133

Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo yang berbeda-beda yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu:¹⁶

- 1) Obligasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun)
- 2) Obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun)
- 3) Obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun)¹⁷

2. Saham

Saham merupakan instrument penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi dalam tingkat status, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Saham ini dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar, atau peningkatan modal dasar.

a. Modal dasar

Sebagai ilustrasi PT X, mempunyai modal dasar seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,00) yang terbagi dalam satu juta lembar saham yang bernilai nominal Rp. 1000,00. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa modal dasar perusahaan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang mencerminkan perkiraan modal yang diperlukan.

b. Modal ditempatkan

Pada saat pendirian Perseroan Terbatas, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan 25% dari modal dasar Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) harus ditempatkan, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

c. Modal disetor

Dari jumlah itu modal yang harus disetor adalah paling sedikit 50% dari nilai nominal yang dikeluarkan. Jadi dari

¹⁶ M. Irsan Nasarudin, et al, op. Cit, hal. 186-187

¹⁷ Ibid, hal. 182-184

Rp. 25.000.000,00 harus disetor sebesar 50%, yaitu Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).¹⁸

Di dalam praktik, terdapat beberapa jenis saham, yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.

a. Saham Berdasarkan Cara Peralihan

1) Saham Atas Unjuk (Bearer Stock)

Adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian saham ini sangat mudah untuk diperalihkan. Saham ini mirip dengan uang, gampang dialihkan. Siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham itu, maka ia dikatakan sebagai pemegang saham tersebut, kecuali dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran hukum dari peralihan tersebut. Barang siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham maka ia adalah pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemilik saham atas unjuk harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena kalau sertifikat tersebut hilang, maka pemilik sertifikat tersebut tidak dapat meminta duplikat penggantinya.¹⁹

2) Saham Atas Nama (Registered Stock)

Adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, yang cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Cara peralihannya harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham.²⁰

b. Saham Berdasarkan Hak Tagihan

1) Saham Biasa (Common Stock)

Adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian

¹⁸ Ibid, hal. 188

¹⁹ Ibid, hal. 189

²⁰ Budi Untung, op. cit, hal. 140

dividen, hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi.

2) Saham Preferen

Adalah saham yang memberikan prioritas pilihan (preferen) kepada pemegangnya, seperti:

- a) Berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen
- b) Berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa
- c) Mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi²¹

3) Saham Istimewa

Pemegang saham istimewa (golden share) mempunyai hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi perusahaan. Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham istimewa dikenal dengan nama saham dwiwarna. Saham ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan jumlahnya satu buah.²²

1.5.3.4 Penawaran Umum

Tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor Kep.122/BL/2009 sebagai berikut:

1. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

- a. Untuk melaksanakan Penawaran Umum Emiten wajib harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum.
- b. Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam, dan Lembaga

²¹ M. Irsan Nasarudin, et al, op. Cit, hal. 190-192

²² Ibid, hal. 193-194

- Keuangan membuat tanda terima sebagai bukti penyerahan.
- c. Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengumuman Prospektus Ringkas, Prospektus dan Prospektus Awal
 - a. Emiten dan setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya dilarang:
 - 1) Mengumumkan Prospektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran
 - 2) Mengumumkan Prospektus dan/atau Prospektus Awal sampai dengan diterimanya pernyataan Bapepam dan Lembaga Keuangan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran umum.
 - b. Prospektus Ringkas wajib diumumkan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan Lembaga Keuangan).
 - c. Dalam hal emiten bermaksud mengumumkan Prospektus dan/atau Prospektus Awal melalui media massa, maka pengumuman tersebut wajib dilaksanakan:
 - 1) Untuk emiten yang bukan merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil, paling cepat bersamaan dengan diumumkannya Prospektus Ringkas.
 - 2) Untuk emiten yang merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil, paling cepat bersamaan dengan diterimanya pernyataan Bapepam dan Lembaga Keuangan bahwa emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan formulir Nomor: IX.A.2-10.
 - d. Dalam hal emiten akan melakukan Penawaran Awal hanya dapat dilakukan setelah Bapepam dan Lembaga Keuangan memberikan pernyataan bahwa emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal dengan menggunakan formulir Nomor IX.A.2-9 dan 10

3. Permintaan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi
 - a. Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi kepada emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum.
 - b. Dalam hal Bapepam dan Lembaga Keuangan meminta emiten membuat perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan.
 - c. Emiten wajib menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atau Pernyataan Pendaftaran.
 - d. Pernyataan Pendaftaran menjadi batal apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Bapepam dan Lembaga Keuangan.
 - e. Dalam hal Bapepam dan Lembaga Keuangan tidak meminta emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau perubahan dan tambahan informasi terakhir dari Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.
4. Efektifnya Pernyataan Pendaftaran
 - a. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan Lembaga Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau
 - 2) Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan Lembaga Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
 - b. Pernyataan efektif dari bapepam dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) dapat diberikan setiap saat setelah:
 - 1) Kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai

- ditelaah oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan, serta Bapepam dan Lembaga Keuangan tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan
- 2) Emiten telah mengkonfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, dan/atau tingkat suku bunga obligasi atau imbal hasil Sukuk.
- c. Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor IX.A.2-1
 - d. Konfirmasi disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah Bapepam dan Lembaga Keuangan menyatakan bahwa emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
 - e. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah Bapepam dan Lembaga Keuangan menyatakan bahwa emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
 - f. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. mengumumkan perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus Ringkas dan tanggal efektif dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Penawaran Umum.
 2. menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembeli
 3. menyampaikan Prospektus dalam bentuk tercetak kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta salinan elektronik (soft copy)nya.
 4. menyampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan bukti pengumuman.

5. Masa Penawaran Umum, Penjatahan dan Laporan Hasil Penawaran Umum
 - a. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan bantuan para Agen Penjualan Efek.
 - b. Emiten wajib melaksanakan Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
 - c. Masa Penawaran Umum paling kurang satu hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - d. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu hari bursa dalam masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
 - e. Pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
 - f. Dalam hal jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan.
 - g. Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum

6. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
 - a) Indek harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut
 - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan.

- 2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman.
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman.
 - d) Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.²³

1.5.3.5. Transaksi Efek

Pelaporan Transaksi Efek, dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-123/BL/2009 sebagai berikut:

1. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan. Sementara Partisipan adalah Perantara Pedagang Efek, Bank, atau Pihak lain yang disetujui Bapepam dan Lembaga Keuangan yang menggunakan sistem dan/atau sarana pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada Penerima Laporan Transaksi Efek. Sedangkan Penerima Laporan Transaksi Efek adalah Pihak yang ditunjuk oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek.
2. Transaksi Efek yang wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan ini adalah transaksi atas Efek bersifat uang dan Sukuk yang telah dijual melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Negara, dan Efek lain yang ditetapkan oleh Ketua

²³ Himpunan Peraturan Pasar Modal, op. Cit, hal. 213-223

Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk dilaporkan, yang diperdagangkan di pasar sekunder.

3. Transaksi Efek yang wajib dilaporkan mencakup antara lain jenis transaksi seperti jual beli putus, hibah warisan, tukar menukar, pengalihan karena penetapan pengadilan, pengalihan karena penggabungan, peleburan atau pengambilan, pinjam-meminjam, transaksi jual dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, pemindah bukuan Efek yang dilakukan oleh Pihak dengan identitas yang sama, pembelian kembali, dan lain-lain.
4. Setiap Pihak dapat melakukan Transaksi Efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.
5. Dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan melalui Bursa Efek, maka Bursa Efek wajib melaporkan setiap transaksi dimaksud seketika setelah transaksi terjadi (real time) sesuai dengan data Transaksi Bursa.
6. Jam pelaporan ditetapkan oleh Penerima Laporan Transaksi Efek, dalam hal transaksi terjadi, dilaporkan atau diinstruksikan penyelesaiannya kepada Partisipan sebelum jam pelaporan, maka batas waktu pelaporan dihitung sejak jam pelaporan dibuka pada hari yang sama dengan transaksi terjadi atau transaksi dilaporkan kepada Partisipan.
7. Partisipan wajib memberikan bukti atas pelaporan Transaksi Efek kepada Pihak yang melaporkan sesegera mungkin setelah pelaporan tersebut diterima Partisipan.
8. Pihak yang menyampaikan pelaporan Transaksi Efek melalui partisipan berhak memperoleh bukti pelaporan Transaksi efek yang disampaikan Partisipan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek dan Partisipan.
9. Penerima laporan Transaksi Efek wajib memberikan bukti atas pelaporan Transaksi efek kepada Partisipan sesegera mungkin setelah Pelaporan pelaporan tersebut diterima Penerima laporan Transaksi Efek.
10. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menyediakan data transaksi yang dapat diakses publik seketika setelah transaksi dilaporkan tanpa memungut biaya. Data transaksi yang wajib tersedia untuk publik antara lain memuat informasi tentang nama dari seri Efek, harga transaksi, imbal hasil, volume

transaksi, nilai transaksi, jenis transaksi, tanggal penyelesaian transaksi, tingkat harga dan jangka waktu transaksi

11. Partisipan wajib memuat dalam kontrak antara Partisipan dan nasabahnya mengenai ketentuan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan Transaksi efek di luar Bursa Efek setelah terjadinya transaksi tersebut.
12. Penyampaian laporan Transaksi efek tidak dikenakan biaya.
13. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menjamin kerahasiaan data Transaksi Efek yang dilaporkan kepadanya selain data yang wajib disediakan kepada publik.
14. Besarnya sanksi denda adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas setiap jam keterlambatan pelaporan per laporan atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per laporan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per laporan.
15. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.²⁴

1.5.4. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT)

1.5.4.1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikemukakan bahwa:

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT, yang berbunyi:

”Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”²⁵

²⁴ Ibid, hal. 245-251

²⁵ Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 17-18

Untuk mendapat status badan hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPA, yang menyatakan sebagai berikut:

”Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Jadi, untuk sampai pada suatu hal yang disebut sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk perseroan terbatas. Akan tetapi, apa dan bagaimana bentuk perseroan terbatas itu sendiri tidak dengan jelas disebutkan di dalam pasal-pasal UUPA. Oleh karena itu, UUPA hanya menekankan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum, padahal institusi badan usaha yang merupakan badan hukum bukan saja badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, melainkan juga yayasan dan koperasi. Boleh jadi, perseroan terbatas adalah pasti merupakan badan hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA tersebut diatas, walaupun masih bergantung pada syarat tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Pasal 7 ayat (4) UUPA, tetapi badan hukum belum tentu merupakan perseroan terbatas.²⁶

²⁶ Ibid, hal. 18

1.5.4.2. Modal Perseroan Terbatas (PT)

Soemitro, menyebutkan, sebagai modal saham atau modal sero atau di dalam bahasa Belanda disebut *maaschappelijk kaapital* atau *statutaire kaapital*, yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian, merupakan jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.

Sedangkan Kansil, menyebut modal perseroan sebagai modal masyarakat karena jumlah modal yang disebut di dalam akta pendirian PT merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.

Sementara Prasetya mengatakan, bahwa apa yang disebut dengan modal perseroan tiada lain adalah keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada dalam PT.²⁷

Dalam struktur modal perseroan, menurut UUPT dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Modal dasar adalah modal maksimum di mana dapat dikeluarkan tanpa perubahan anggaran dasar dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.
2. Modal yang ditempatkan yaitu sejumlah modal dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri.
3. Modal yang disetor adalah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya.²⁸

1.5.4.3. Saham Perseroan

Menurut Rido, saham mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:

1. Saham sebagai sebagian dari modal

²⁷ Ibid, hal. 42-43

²⁸ Ibid, hal. 43

Dikatakan demikian, karena pada dasarnya saham itu merupakan modal, sebagai yang sering dibaca dalam akta pendirian PT, maka dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham.²⁹

2. Saham sebagai tanda anggota

Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama PT diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai inbreng ke dalam perseroan. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan demikian, saham, menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota yang disebut persero dari PT dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota.

3. Saham sebagai alat legitimasi

Artinya ialah, saham merupakan suatu surat yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.³⁰

1.5.5. Tinjauan Umum Kepailitan

1.5.5.1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), yang dalam Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

²⁹ Ibid, hal. 54

³⁰ Ibid, hal. 54

- (2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.³¹

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Dari definisi di atas tampak bahwa kepailitan itu pun merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitur untuk pemenuhan kepada debitur.³²

1.5.5.2. Tujuan Kepailitan

Sebagaimana dikutip oleh Jordan dari buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E. Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut:

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para kreditornya.
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.³³

1.5.5.3. Syarat-Syarat PT dinyatakan Pailit

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, `Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 24

³² Ibid, hal. 25

³³ Ibid, hal. 29

Syarat-syarat PT dinyatakan Pailit sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.

Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pailit ditetapkan apabila debitur yang mempunyai dua kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
2. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (*concursum creditorum*)
3. Harus ada utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidak adanya utang.
4. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih.
5. Debitur harus dalam keadaan insolvent, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitur harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya, bukan sekadar tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja.³⁴

1.5.5.4. Kurator dalam Kepemilikan

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Kurator

Menurut pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, yang dapat menjadi kurator (dalam hal bukan balai harta penanggalan yang menjadi kurator) adalah:

- a. Perorangan atau persekutuan perdata (kantor-kantor pengacara /konsultasi hukum dapat ditunjuk menjadi kurator) yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.

³⁴ Ibid, hal. 31-32

b. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman

Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

- 1) Permohonan kurator sendiri
- 2) Permohonan kurator lainnya, jika ada
- 3) Usul hakim pengawas atau
- 4) Permintaan debitur pailit

Sedangkan mengenai pemberhentian kurator, menurut Pasal 71 ayat (2), pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.³⁵

2. Tugas dan Wewenang Kurator

- a. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit
- b. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas
- c. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas
- d. Menyusun inventaris harta pailit
- e. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit
- f. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator, dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit

³⁵ Ibid, hal. 61

- g. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit, kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit, diserahkan kepada si pailit, kurator menerima pengaduan mengenai si pailit
- h. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dan keluarganya dengan izin hakim pengawas.

1.5.5.5. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham setelah PT dinyatakan

Pailit

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
2. Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
3. Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan Cuma-Cuma, harus dilindungi.
4. Benda yang diterima oleh Debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta yang pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Pasal 50 menyatakan:

1. Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitur Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
3. Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

4. Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
5. Hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
6. Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

1.5.5.6. Hak dan Kewajiban PT setelah dinyatakan Pailit

Dikatakan pailit apabila PT tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap kreditor yang telah memberikan pinjaman kepada PT yang pailit.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa:

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
2. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
3. Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar

benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 60 menyatakan:

1. Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
2. Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
3. Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif-analisis yaitu dengan berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya tipe penelitian yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontaktual terhadap aspek hukum.

Penelitian Skripsi ini bersifat yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian utama dalam Skripsi ini, dengan mengacu terhadap bahan-bahan pustaka. Penelitian berupa

inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus³⁶

Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
 - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus bahasa Indonesia

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Kepustakaan sebagai suatu badan yang berisi informasi yang diperlukan dalam penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.³⁷ Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan,

³⁷ Ibid, hal. 103

ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain

1.6.4. Metode Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik.

Metode deduktif digunakan untuk data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan sedangkan metode induktif digunakan untuk data yang diperoleh dari lapangan dan bersifat pelengkap saja.³⁸

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini.

Bab I pendahuluan di dalam sub bab pertama disajikan tentang latar belakang permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sub bab kedua mengenai perumusan masalah. Selanjutnya disajikan sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada sub bab kelima kajian pustaka yang merupakan landasan teori dari penulisan skripsi, yang kemudian diuraikan definisi yang berkaitan dengan judul diatas. Dan sub bab keenam metode penelitian yang merupakan syarat mutlak dalam setiap penelitian ini dibagi menjadi 4 yaitu jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

³⁸ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 23

Bab II pembahasan tentang perumusan masalah yang pertama mengenai pelaksanaan pembelian saham di bursa efek. Sub bab pertama menguraikan tentang praktek pelaksanaan pembelian saham di bursa efek. Selanjutnya sub bab kedua diuraikan mengenai kendala-kendala dalam praktik pelaksanaan pembelian saham di bursa efek tersebut.

Bab III pembahasan tentang perumusan masalah yang kedua mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham akibat kelalaian pengurus yang mengakibatkan PT “X” pailit. Sub bab pertama menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham. Sub bab kedua mengenai pertanggungjawaban direksi dan komisaris yang lalai sehingga mengakibatkan PT menjadi pailit.

Bab IV penutup berisi tentang kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, juga berisi saran-saran yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.